



“Komitmen Penegakan HAM Pemerintah dan Implikasinya dalam Hubungan Internasional”



“Refleksi Akhir

**Tahun Papua 2010: Meretas Jalan Damai Papua”,
Aryaduta , Jakarta 13 Desember 2010**

Rafendi Djamin
Wakil Indonesia untuk AICHR
rafendidjamin@gmail.com

Pokok bahasan

- HAM dalam Kebijakan luar negeri Indonesia
- Overview Penegakan HAM 2010 di Indonesia
- Sorotan Internasional pada penegakan HAM di Papua
- Langkah kedepan pelaksanaan komitmen HAM di Papua dan Hubungan Internasional

HAM dalam Kebijakan Luar Negeri

- Sejak 6 tahun terakhir pemerintahan SBY-Kalla dan SBY- Budiono melanjutkan kebijakan luar negeri yang mengutamakan HAM. Partisipasi aktif di Dewan HAM PBB dan Komite III SU-PBB
- Keberhasilan pada tingkat regional ASEAN dalam pembentukan Piagam dan Komisi HAM ASEAN 2009
- Partisipasi aktif dalam proses penyusunan TOR Komisi HAM Independen Organisasi Konferensi Islam

Karakter Diplomasi HAM di tingkat Global

- Meninggalkan “culture of Denial” budaya Menyangkal
- Berdasar pada komitmen dan kepentingan Nasional dalam Demokrasi dan HAM

HAM dalam Kebijakan LN di tingkat Global

- Komite CEDAW, Komite CERD, Komite PBB Anti Penyiksaan (Mei 2008) dan UPR (universal Periodical Review Juni 2008)
- Bekerjasama dengan berbagai Pelapor khusus HAM PBB dalam merespon “urgent letter” atau “Letter of allegation”
- Mengundang Pelapor khusus PBB utk pembela HAM (2007) dan Anti Penyiksaan (2007)
- Partisipasi aktif dalam negosiasi resolusi PBB ttg kondisi HAM di Gaza, Myanmar, Korea-Utara)
- Menyelesaikan berbagai Laporan pelaksanaan Konvensi HAM PBB (komite Hak Anak, Komite HAM PBB ttg Hak SIPOL, komite PBB untuk hak EKOSOB di tahun 2010-2011)

Overview Penegakan HAM Indonesia 2010

- Meningkatnya kekerasan terhadap kelompok agama minoritas (kristen, ahmadiyah dan berbagai pengikut minoritas dalam Islam)
- Khusus terhadap pengikut Ahmadiyah terutama paska keputusan MK ttg tuntutan pencabutan UU Penodaan Agama
- Konflik perburuhan dan Tuntutan terhadap jaminan sosial
- Buruh Migran
- Konflik Sumber daya alam antara pemerintah/korporasi dgn masyarakat lokal

Sorotan Internasional pada kondisi HAM Papua

- Tom Lantos Human Rights Commission dari US Congress (Washington DC)
- Kelompok Parlemen untuk Papua di Inggris (London-Inggris Raya)
- Human Rights Watch (Penyiksaan) - New York, USA
- Amnesty Internasional (Prisoners of Conscience)- London-UK).
- Interfaith Network on West Papua (Papua Tanah Damai)
- UN Permanent Forum for Indigenous People (New York)

Sorotan PBB pada HAM Papua

Pelapor Khusus HAM PBB:

Anti penyiksaan,

Masyarakat adat,

Pembunuhan kilat,

Perlindungan Pembela HAM

Komite Pemantau konvensi HAM PBB

Penghapusan Diskriminasi, Penghapusan
Penyiksaan

Sorotan berbagai Mekanisme HAM PBB pada Papua

- **Kesimpulan dan Rekomendasi Komite PPB anti Penyiksaan 2008**
- **Komite** juga sangat prihatin mengenai banyaknya dugaan berkelanjutan yang kredibel dan konsisten, yang dipertegas oleh laporan dari Pelapor Khusus tentang Penyiksaan dan sumber-sumber lainnya, mengenai penggunaan kekerasan secara rutin dan tidak seimbang dan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang meluas oleh anggota-anggota pasukan keamanan dan kepolisian, termasuk oleh anggota-anggota TNI, Brimob, dan kelompok-kelompok paramiliter, selama operasi-operasi militer dan “sapu bersih”, secara khusus di Papua, Aceh, dan provinsi-provinsi lain di mana telah berlangsung konflik bersenjata.[\[1\]](#)
- [\[1\]](#) CAT, Concluding observations of the Committee against Torture INDONESIA , CAT/C/IDN/CO/2, 2 July 2008, Para 11. Lihat pula, Concluding Observations: Indonesia. 01/11/2002. A/57/44, para 7

Opsi Langkah Kedepan

- Membuka akses yang lebih mudah ke Papua bagi Media Internasional, researcher, diplomat .
- Meninggalkan tindakan represif dalam aksi damai aspirasi peninjauan sejarah atau aspirasi kemerdekaan
- Penyelesaian salah satu kasus pelanggaran HAM berat.
- Mendukung konsolidasi persiapan dialog pemerintah Pusat dengan Papua

Terima kasih